

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



**JL.KUDUS COLO Km. 5
TELP (0291) 430010
KUDUS 59352**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



**JL.KUDUS COLO Km. 5
TELP (0291) 430010
KUDUS 59352**

RENDITA PER
L'ANNO
MILITARE
MILITARE
MILITARE
MILITARE



RENDITA PER
L'ANNO
MILITARE
MILITARE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan Bae setelah adanya Perencanaan Rencana Kerja sesuai dinamika Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae selain sebagai Pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai upaya sarana peningkatan Kinerja Kecamatan Bae. Untuk dapat merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bae Tahun 2023 dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperoleh Peningkatan Kinerja yang baik.

Harapan kami, semoga Penyusunan Perencanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023, dapat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan tugas – tugas kedepan.

Kudus, *Juli* 2022


CAMAT BAE
MINTORO, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199311 1 002

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, on the subject of the proposed project.

On the 15th day of March, 1954, the Bureau of Land Management, Department of the Interior, advised that the proposed project is located on the public lands of the United States.

The proposed project is situated on the public lands of the United States, and the Bureau of Land Management, Department of the Interior, has advised that the proposed project is located on the public lands of the United States.

The proposed project is situated on the public lands of the United States, and the Bureau of Land Management, Department of the Interior, has advised that the proposed project is located on the public lands of the United States.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Rencana Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGADAAN KECAMATAN BAE	48
BAB V PENUTUP	49
5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	49
5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaannya	49
5.3. Rencana Tindak Lanjut	49

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PH 441

LECTURE 10

1. The first part of the lecture discusses the concept of a wave function and its role in quantum mechanics. It is introduced as a mathematical tool that allows us to describe the state of a particle and predict the outcomes of measurements.

2. The second part of the lecture focuses on the Schrödinger equation, which governs the time evolution of the wave function. We explore how this equation is derived from the classical energy conservation principle and how it applies to various physical systems, including free particles and particles in potential wells.

3. The third part of the lecture discusses the concept of probability density and the Born rule, which states that the square of the magnitude of the wave function represents the probability of finding a particle at a particular location. We also touch upon the uncertainty principle and its implications for the measurement process.

4. The final part of the lecture covers the topic of wave-particle duality and the double-slit experiment. We examine how the wave-like behavior of particles leads to interference patterns, and how the act of measurement collapses the wave function, resulting in particle-like behavior. This highlights the profound connection between quantum mechanics and the nature of reality.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022	8
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bae	20
3. Tabel 2.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023	27
4. Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan Kecamatan Bae Tahun 2023..	41

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rasionalitas penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Untuk itu diperlukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2023 yang tepat dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun lalu (hasil tahun 2021) dan penetapan target pada tahun berjalan (tahun 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada, untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Tantangan utama dari pembangunan daerah adalah pada kompleksnya permasalahan pembangunan dan disisi lain pada keterbatasan sumber daya itu sendiri. Kondisi yang demikian menuntut suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, strategi program maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan stakeholders daerah.

Kecamatan Bae adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 2.332,28 Ha yang terdiri dari 10 Desa, dengan jumlah penduduk 72.387 jiwa terdiri dari laki-laki 35.675 jiwa dan perempuan 36.712 jiwa. Kecamatan Bae mempunyai Desa yang diusulkan menjadi obyek wisata yaitu di Sendang Jodo Desa Purworejo.

Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2023 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif untuk tahun 2020, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023 menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang mencakup Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif, dan Sumber dana serta prakiraan maju pagu indikatif. Selain itu Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan pembangunan di wilayah Kecamatan Bae dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018;

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawasan pada Kecamatan di Kabupaten Kudus;
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bae Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2023 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bae guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kudus maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif dapat terwujud.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kudus khususnya Kecamatan Bae;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
4. Memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

Accounting Principles

2. In accordance with the accounting principles, the company must adhere to the double-entry system. This means that for every debit entry, there must be a corresponding credit entry of equal value. This system helps in maintaining the balance sheet and ensures that the total debits always equal the total credits.

3. The second part of the document outlines the various methods used for recording transactions. It includes the journalizing process, where transactions are first recorded in a journal before being posted to the ledger. This method allows for a chronological record of all business activities.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5300 S. DICKINSON ST.
CHICAGO, ILL. 60637

TO THE HONORABLE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RE: PROPOSAL FOR THE PURCHASE OF
EQUIPMENT FOR THE PHYSICS DEPARTMENT

FOR THE YEAR 1900

THE PHYSICS DEPARTMENT HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF YOUR LETTER OF
THE 15TH INSTANT AND TO ADVISE YOU THAT
THE BOARD OF TRUSTEES HAS APPROVED THE
PURCHASE OF THE EQUIPMENT LISTED
HEREIN FOR THE YEAR 1900.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae pada tahun lalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target capaian program yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target capaian program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Dari 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja esuai yang direncanakan.

- b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- 1.1 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 2.1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- 3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

- 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan Administrasi dan Pelaporan Keuangan

- 3.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai Standar

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

- 3.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Peningkatan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Terlaksananya kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Terpeliharanta Barang Milik Daerah
- 4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Indikator : Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
- 5. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - 5.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator : Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Ekonomi dan Pembangunan
- 6. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator : Peningkatan Pelayanan Penyelenggaran Pemerintah
- 7. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - 7.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator : Peningkatan Administrasi Pemerintah Desa

Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2021 seperti digambarkan pada tabel 2.1, meliputi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 (RKPD n-2) dan target pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 (RKPD n-1) yang dituangkan dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun lalu sebagai berikut :

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to verify the accuracy of financial statements and to identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a clear and concise manner, using a standardized format. This includes recording the date, amount, and nature of each transaction. The document also requires that records be maintained for a minimum of seven years, unless otherwise specified by law. It further notes that records must be stored in a secure and accessible location, and that access to them should be restricted to authorized personnel only.

3. The third part of the document discusses the role of internal controls in ensuring the accuracy of records. It explains that internal controls are designed to prevent errors and fraud by establishing a system of checks and balances. This includes separating duties, requiring authorization for transactions, and performing regular reconciliations. The document stresses that internal controls are a critical component of any financial system and that they must be designed and implemented effectively to ensure the reliability of the records.

4. The fourth part of the document addresses the issue of data security. It notes that as financial records are increasingly stored electronically, it is essential to take appropriate measures to protect them from unauthorized access, loss, or destruction. This includes implementing strong password policies, using encryption for sensitive data, and having a disaster recovery plan in place. The document also emphasizes the importance of regularly updating security software and conducting security audits to identify and address any vulnerabilities.

5. The fifth part of the document discusses the importance of training and education for staff involved in record-keeping. It states that staff must be properly trained in the requirements and procedures for record-keeping to ensure that they are able to perform their duties accurately and efficiently. This includes providing ongoing training and education to keep staff up-to-date on any changes in regulations or best practices. The document also notes that staff should be encouraged to report any suspected irregularities or errors immediately to their supervisors.

6. The sixth part of the document discusses the role of external audits in verifying the accuracy of records. It explains that external audits are conducted by independent auditors who examine the records and financial statements to provide an objective opinion on their accuracy. The document notes that external audits are a key component of the financial system and that they help to build confidence in the reliability of the records. It also emphasizes the importance of cooperating fully with auditors and providing them with all the information they need to perform their duties.

7. The seventh part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It states that financial records should be made available to stakeholders in a timely and accessible manner, and that any discrepancies or irregularities should be promptly investigated and reported. The document also notes that transparency and accountability are essential for maintaining the trust of investors and the public in the financial system.

8. The eighth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in regulations and best practices. It notes that the financial system is constantly evolving, and that it is essential to stay informed of any new requirements or standards. This includes attending industry conferences, participating in professional development activities, and staying up-to-date on relevant legislation and regulations. The document also emphasizes the importance of seeking advice from experts when needed to ensure compliance with all applicable requirements.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bae dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Bae s/d tahun 2022
Kabupaten Kudus

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020	
					Target SKPD Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)	-	100%	-	-	-	-	-	25%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Festival dan Budaya	-	1 Kali	-	-	-	-	-	25%
4.1.2	Prgram Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bae)	-	1 Kali	-	-	-	-	-	25%
4.1.2.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tk. Kec	-	1 Kali	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	6 Dok	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	-	6 Dok	-	-	-	-	-	25%



The diagram illustrates a process flow involving several stages and components. The main flow starts from the top, moving downwards through various boxes. Key elements include:

- Top Section:** A large box containing the main title or starting point of the process.
- Intermediate Stages:** Several boxes branching out from the top, representing different paths or sub-processes.
- Bottom Section:** A series of boxes that likely represent the final outputs or conclusions of the process.

The diagram is highly detailed, with many small boxes and connecting lines, suggesting a complex system or a multi-step procedure. The text within the boxes is too faint to transcribe accurately, but the overall structure is clear.

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.12.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dok	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	25 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dok	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Barang Milik Daerah	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Gedung Kantor	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Perlengkapan Kantor	26 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Harian Pegawai, dan Tamu	1 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	-	-	-	-	-	-	25%

Year	Month	Day	Event	Notes
1950	Jan	1
1950	Jan	2
1950	Jan	3
1950	Jan	4
1950	Jan	5

Year	Month	Day	Event	Notes
1950	Jan	6
1950	Jan	7
1950	Jan	8
1950	Jan	9
1950	Jan	10

Year	Month	Day	Event	Notes
1950	Jan	11
1950	Jan	12
1950	Jan	13
1950	Jan	14
1950	Jan	15

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Jenis Bacaan dan Perundang - undangan	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dalam dan luar kota	147 oh	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Menyurat, dan Jasa Telpn Air, Listrik	100%	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Honor Tenaga Pelayanan Umum, Honor Tenaga Kebersihan dan Premi Asuransi	12 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	16 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saranan dan Prasaranan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	10:00
1950	Jan	2	10:00
1950	Jan	3	10:00
1950	Jan	4	10:00
1950	Jan	5	10:00
1950	Jan	6	10:00
1950	Jan	7	10:00
1950	Jan	8	10:00
1950	Jan	9	10:00
1950	Jan	10	10:00
1950	Jan	11	10:00
1950	Jan	12	10:00
1950	Jan	13	10:00
1950	Jan	14	10:00
1950	Jan	15	10:00
1950	Jan	16	10:00
1950	Jan	17	10:00
1950	Jan	18	10:00
1950	Jan	19	10:00
1950	Jan	20	10:00
1950	Jan	21	10:00
1950	Jan	22	10:00
1950	Jan	23	10:00
1950	Jan	24	10:00
1950	Jan	25	10:00
1950	Jan	26	10:00
1950	Jan	27	10:00
1950	Jan	28	10:00
1950	Jan	29	10:00
1950	Jan	30	10:00
1950	Jan	31	10:00

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.02.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik		-	-	-	-	-	-	25%
7.01.02.2.02	Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	1 Keg	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pameran UMKM yang dilaksanakan	1 Keg	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba, Organisasi Kepemudaan, Organisasi perempuan, Fasilitasi Kegiatan dan Money dan pelaporan Desa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.5.2.01	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Jumlah Kasus Konflik Sosis yang tertangani</p>	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.5.2.01.05	<p>Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Jumlah Kasus Konflik yang tertangani</p>	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01	<p>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi</p>	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01.01	<p>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</p>	<p>Evaluasi Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa</p>	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01.03	<p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p>	<p>Jumlah Money dan Pelaporan Bidang Pemerintahan Desa yang terlaksana dan Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan keuangan Desa</p>	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.6.2.01.09	<p>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p>	<p>Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan</p>	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

- a. Secara umum realisasi Program/ Kegiatan pada Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan dengan penyerapan anggaran sebesar 96,07% dari pagu anggaran dan terdapat efisiensi 3,93%.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

- a. Program Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan dengan hasil/ keluaran antara lain terkirimnya surat, tersedianya jasa telpon, internet dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa jaminan barang milik daerah, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional, jasa administrasi keuangan, jasa pelaksanaan kegiatan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, serta rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur dengan hasil/ keluaran antara lain Pengadaan mobil dinas, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;
- c. Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan hasil/ keluaran antara lain Evaluasi Perdes tentang Apbdesa/ Perubahan Apbdes, Monitoring evaluasi dan pelaporann penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan terlaksananya Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa di bidang Manajemen Pemerintah Desa;
- d. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat dengan hasil/ keluaran antara lain Pembinaan Organisasi Perempuan PKK, Fasilitasi sosial;
- e. Program fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan Desa/ Kelurahan antara lain Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa, pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- f. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan hasil/keluaran antara lain Patroli pendisiplian penegakan masker/ pengamanan jenazah covid-19, piket kantor, patroli wilayah, operasional tim terpadu penanganan konflik sosial di Kecamatan;
- g. Program fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dengan hasil/ keluaran antara lain Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan, Sosialisasi pelayanan.

- 2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.**
- a. Semua program/ kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kecamatan Bae tidak ada yang melebihi target, karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- 2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :**
- a. Adanya Rasionalisasi refocusing anggaran Kabupaten sebab pandemi covid-19 yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan terhambat dilaksanakan di tahun 2021;
 - b. Pengelolaan Keuangan yang belum akuntabel;
 - c. Penerapan jadwal kegiatan yang ketat;
 - d. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang cakap.
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae adalah sebagai berikut :**
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae Tahun 2021 – 2023 berdampak positif bagi kelancaran Administrasi Perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bae pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasi belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bae.
- 2.1.6 Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.**
- a. Membuat perencanaan dengan memaksimalkan pagu anggaran.
 - b. Menerapkan target sesuai kemampuan OPD.
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada Instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts), Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan bae sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga Indikator Kinerja Output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bae memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bae seperti digambarkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Keamatan Bae
Kabupaten Kudus

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan pelaporan : Renstra, renja, RKP, LKPJ, Lakip/ LKJIP, LPPD, Laporan Bulanan Kec dan Laporan Evaluasi Hasil renja OPD.	-	Kualitas Data Perencanaan	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	Terpenuhi
2.	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana, Jasa Administrasi Keuangan dan Honorarium Asuransi Premi Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Mobil dan Motor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
3.	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Peralatan, Pengadaan Meubeler	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
4.	Terpeliharanya Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Meubeler	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	2 Unit	10 Unit	15 Unit	6 Unit	5 Unit	1 Pkt	2 Unit	20 Unit	-	6 Unit	5 Unit	Terpenuhi
5.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Matrasi, Langganan Telpon, Internet, dan Listrik, Asuransi Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Camat	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	1 Pkt	Terpenuhi
6.	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan, Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Bahan Bacaan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
7.	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat Dinas Tamu dan Kegiatan Lainnya	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
8.		-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
9.	Terlaksananya Rapat – rapat Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
10.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Administrasi Kantor dan Tenaga Outsourcing Kebersihan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	Terpenuhi
11.	Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas Camat	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	Terpenuhi
12.	Terlaksananya Evaluasi Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
13.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pilkades, Pelaksanaan Pemilihan BPD dan Pengisian Perangkat Desa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
14.	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Manajemen Pemerintahan Desa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
15.	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
16.	Terfasilitasnya Lomba Sekolah Sehat, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Rebana Tingkat Kecamatan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	Terpenuhi
17.	Terfasilitasi Kegiatan Sosial	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
18.	Terfasilitasnya Festival dan Kirab Budaya	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
19.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
20.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi perempuan (PKK)	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
21.	Terfasilitasi Desa dalam Ranga Pembinaan RT/ RW	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
22.	Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	-	1 Desa	1 Desa	1 Desa	Terpenuhi
23.	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	-	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	Terpenuhi
24.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
25.	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	-	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	Terpenuhi
26.	Terfasilitasinya Promo Produk UMKM dan Pasar Murah	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	-	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	Terpenuhi
27.	Terfasilitasinya Monitoring Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		2022
28.	Terlaksananya Piket Kantor, Patroli Wilayah, Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kecamatan, Lomba Kamplang Tingkat Kecamatan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
29.	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	Terpenuhi
30.	Terlaksananya Pembinaan Bela Negara	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
31.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan, Sosialisasi Pelayanan Paten	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai tupoksi Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Isu Strategis yang di indentifikasi adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Desa, BLT Covid – 19, Dana Penggunaan Covid 19 dan Dana Bantuan Gubernur Tahun 2021 dilaksanakan oleh Kecamatan Bae untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan dalam penggunaannya.

Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang terjadi di wilayah.

Adapun permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi :

- Kurang terfasilitasinya sektir ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelayihan SDM dan Pemasaran Produk.
 - Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait.
 - Kurangnya tingkat kesadaran lingkungan dalam kesiapsiagaan bencana.
- Pelayanan Masyarakat
Meliputi Pembuatan KK, KTP, Legalisasi surat-surat, Proposal, Perijinan dan lain-lain yang diajukan masyarakat telah berjalan dengan baik dan lancar .

2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bae serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus disusun melalui tahapan-tahapan proses Perencanaan Pembangunan sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/ organisasi Perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bae diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan, Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan Pemerintah, maka Kecamatan Bae melakukan review atas rancangan awal RKPD tertuang dalam tabel 2. 4.

Tabel 2.4

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KABUPATEN KUDUS TINGKAT : RANCANGAN AWAL OPD**

OPD : 4.01.07 : KECAMATAN BAE

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian REPO Tahun 2021	Praktisan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2024		P D P E J J		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2															
2								12,100,000				11,000,000			
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Saluran pengembangan kebudayaan (arsitektur)	%		%	100 %	12,100,000					100 %	11,000,000		
2	Pelestarian kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pentas seni dan budaya lokal	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	12,100,000					1 kegiatan	11,000,000		
2	001	002	003			1 kali	12,100,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kecamatan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan pelayanan publikasi tata kelola pemerintahan	1 kali	11,000,000	KECAMAT BAE	
4															
4							12,000,000						11,000,000		

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

URUSIR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

7	01	001	2.06	001	001	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	8 Jenis	2,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	8 Jenis	3,300,000	KI T/
7	01	001	2.06	002	002	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	30 Jenis	18,225,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	30 Jenis	11,000,000	KI T/
7	01	001	2.06	003	003	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 Paket	7,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 Paket	3,300,000	KI T/
7	01	001	2.06	004	004	Persediaan Barang Logistik Kantor		3 Paket	10,114,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	3 Paket	6,800,000	KI T/
7	01	001	2.06	005	005	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Paket	13,285,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	3 Paket	4,000,000	KI T/

7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				2 Dokumen	4.200,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	2 Dokumen	4.000,000	KE TA
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah				10 Laporan	14.776,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 Laporan	35,000,000	KE TA
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	%	%		100 %	185.687,000						85,000,000	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya (komputer, laptop, printer, kipas angin dan cheslaw)				7 Unit	86.837,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Bae	7 Unit	63,000,000	
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Kantor yang tersedia				7 Unit	303.850,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan Bae	7 Unit	22,000,000	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	124.046,000						227,790,000	

7	01	001	2.08	001	001	001	12 Laporan	2,000,000	Kab. Kudat, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polikukuhkams Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemanfaatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 Laporan	2,200,000	KECAF TANB
7	01	001	2.08	002	002	12 bulan	12 bulan	73,402,000	Kab. Kudat, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polikukuhkams Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemanfaatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	93,300,000	KECAF TANB
7	01	001	2.08	004	004	12 bulan	12 bulan	46,644,000	Kab. Kudat, Bae, Semua Kelurahan	Data Transfer Umum-Data Akuisi Umum	Memperkuat Stabilitas Polikukuhkams Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemanfaatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	132,000,000	KECAF TANB
7	01	001	2.09	001	001	bulan	bulan	230,095,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Catupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Bae)			12 bulan	203,600,000	

7	01	006	2.01	003	Fasilitas Penghinaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa	93 orang	34,180,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformati Pelayanah Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	93 orang	20,748,400	KEI TAI
						Jumlah fasilitas pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	10 desa				10 desa					
7	01	006	2.01	009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yang terfasilitasi	1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformati Pelayanah Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	1 Kegiatan	7,000,000	KEI TAI
							TOTAL	3,026,246,000						3,712,011,000		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Bae mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Merencanakan, Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan, Pemeliharaan sarana dan Fasilitas Pelayanan umum, Kegiatan Pemerintahan, membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Kebijakan nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Bae disinkronkan dengan kebijakan Daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bae yaitu penataan kelembagaan birokrasi Pemerintahan melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan Instansi Pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal. Adapun program kegiatan Kecamatan Bae yang menunjang pelaksanaan kebijakan daerah yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Umum; dan
- Program Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BAE

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja Kecamatan bae berdasarkan RENSTRA Kecamatan Bae 2019 – 2023 adalah terwujudnya fasilitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan RENSTRA Kecamatan Bae 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah;
- Terwujudnya fasilitas pelayanan publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif.

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. FAKTOR – FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bae Tahun 2023 ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu :

1. Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu “ Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dilakukan antara lain :
 - a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
 - b. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
 - d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.
2. Kebijakan Nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Bae disinkronkan dengan kebijakan Daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bae.

Dalam menentukan program dan kegiatan Kecamatan Bae Tahun 2022 faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yaitu Program fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Tujuan dan Sasaran Renstra

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bae.

4. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022, Kecamatan Bae mengacu pada Peraturan yang telah ditetapkan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja 2022 yaitu Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

b. URAIAN GARIS BESAR MENGENAI REKAPITULASI PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Bae dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022, Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bae Tahun 2023 adalah sebanyak 8 Program dan 14 Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - 1.1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 2.1. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 - 3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 5.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 6.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 7.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan di 16 Desa se Kecamatan Bae dengan cara penyuluhan dan pembinaan.

- b. Total kebutuhan dana menurut sumber pendanaan Rp. 3.098.101.528,-
- c. Penjelasan rumusan program/ kegiatan/ dana tidak sesuai rancangan awal karena lokasi dan sasaran sesuai data yang ada dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan Pelayanan Kecamatan Bae pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Auditor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Assessor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Collector. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Marshal. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Sheriff. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Constable. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Justice of the Peace. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Notary Public. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Clerk of the Court. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PELAYANAN KECAMATAN UNDAAN TAHUN 2023
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD ; 4.01.07 : KECAMATAN BAE

NO	PROGRAM/KRGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT)	TARGET (VOLUME)	PAGU	SUMBER DANA	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)		12,100,000		
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pentas seni dan budaya lokal	1 kegiatan	12,100,000		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah fasilitasi penta seni dan pelestarian budaya lokal yang terlaksanaan	1 kali	12,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BAE
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH			10,600,000		
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (undaan)	100 %	10,600,000		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tertaksananya MTQ tingkat Kecamatan	1 kegiatan	10,600,000		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali	10,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BAE

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the model under different conditions.

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	8 Paket	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis Kantor yang Disediakan	30 Jenis	18,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	10,114,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Bae
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	13,285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	14 OH	16,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	188,687,000		Kecamatan Bae
	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	86,837,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, laptop, printer, kipas angin dan chansaw)	7 Unit	101,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	124,046,000		Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	4 Jenis	73,402,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	48,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Bae)	12 bulan	230,095,000		Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	98,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia Terbayarnya honorarium tenaga non pns	12 bulan	93,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	37,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bae)	100 %	14,190,000		Kecamatan Bae
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	10 Desa	14,190,000		Kecamatan Bae
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan	2 Kegiatan	14,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bae)	100 %	41,194,000		Kecamatan Bae
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa	10 Desa	41,194,000		Kecamatan Bae
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pameran UMKM yang terlaksana	1 kali	6.060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	1 desa			
		Jumlah kegiatan social	3 kegiatan	35,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice, and that these documents should be stored in a secure and accessible location. The text also mentions the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. This includes the use of surveys, interviews, and focus groups to gather qualitative data, as well as the application of statistical models to analyze quantitative information. The importance of choosing the right methodology for the specific research objectives is highlighted.

The third part of the document focuses on the ethical considerations that must be taken into account when conducting research. It stresses the need for informed consent from all participants, the protection of their privacy, and the avoidance of any potential conflicts of interest. The author also discusses the importance of transparency in reporting the results of the study.

Finally, the document concludes by summarizing the key findings and providing recommendations for future research. It suggests that further exploration into the relationship between the variables studied would be beneficial, and that the use of more advanced analytical techniques could provide deeper insights into the data.

Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		1 organisasi	Umum
	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	
	Jumlah pelaksanaan money dan pelaporan dana desa	10 desa	
	Jumlah pembinaan RT RW yang dilaksanakan	10 desa	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	43,098,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Desa	43,098,000
		12 bulan	
		10 desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	43,098,000
		50 orang	
			Kecamatan Bae
			Kecamatan Bae

8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Bae)	100 %	42,181,000	Kecamatan Undaan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	10 Desa	48,160,000	Kecamatan Bae
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen	4,000,000	
		Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	93 orang		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa	93 orang	34,160,000	Kecamatan Bae
		Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	10 desa		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yang terlaksana	1 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Bae
		TOTAL		3,826,246,000	

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	10:00
1950	Jan	2	10:00
1950	Jan	3	10:00
1950	Jan	4	10:00
1950	Jan	5	10:00
1950	Jan	6	10:00
1950	Jan	7	10:00
1950	Jan	8	10:00
1950	Jan	9	10:00
1950	Jan	10	10:00
1950	Jan	11	10:00
1950	Jan	12	10:00
1950	Jan	13	10:00
1950	Jan	14	10:00
1950	Jan	15	10:00
1950	Jan	16	10:00
1950	Jan	17	10:00
1950	Jan	18	10:00
1950	Jan	19	10:00
1950	Jan	20	10:00
1950	Jan	21	10:00
1950	Jan	22	10:00
1950	Jan	23	10:00
1950	Jan	24	10:00
1950	Jan	25	10:00
1950	Jan	26	10:00
1950	Jan	27	10:00
1950	Jan	28	10:00
1950	Jan	29	10:00
1950	Jan	30	10:00
1950	Jan	31	10:00

BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN BAE

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Kudus 2019 – 2023 dan untuk mendukung prioritas Pembangunan Daerah, dan Prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar Pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

Program Kecamatan bae Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Rencana Program prioritas beserta Indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program prioritas ini didasarkan atas strategis dan kebijakan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Kegiatan yang dipilih setiap program untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya).

POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

The first step in the polymerization of vinyl monomers is the formation of a free radical. This is usually achieved by the use of a radical initiator, which decomposes to form two free radicals. The free radicals then attack the double bond of the monomer, forming a new radical species. This process repeats itself, leading to the growth of the polymer chain.

The rate of polymerization is dependent on the concentration of the monomer and the initiator. The reaction is typically first order with respect to the monomer concentration and half order with respect to the initiator concentration. The overall rate of polymerization is given by the equation:

$$R_p = k_p \frac{[M]^{3/2} [I]^{1/2}}{k_t^{1/2}}$$

where R_p is the rate of polymerization, $[M]$ is the monomer concentration, $[I]$ is the initiator concentration, k_p is the propagation rate constant, k_t is the termination rate constant, and k_d is the decomposition rate constant of the initiator. The equation shows that the rate of polymerization increases with increasing monomer concentration and decreasing initiator concentration.

The degree of polymerization is defined as the average number of monomer units per polymer chain. It is given by the equation:

$$\bar{P}_n = \frac{R_p}{k_t [M]} = \frac{k_p [M]}{k_t [M]}$$

where \bar{P}_n is the degree of polymerization, R_p is the rate of polymerization, $[M]$ is the monomer concentration, and k_t is the termination rate constant. The equation shows that the degree of polymerization is directly proportional to the monomer concentration and inversely proportional to the termination rate constant.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bae Tahun 2019 – 2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu " KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA". Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman bagi Pemerintahan Kecamatan Bae di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bae berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.
 - b. Kecamatan Bae berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bae Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bae Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bae Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2022.
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2023 juga berfungsi sebagai saranan peningkatan kinerja Kecamatan Bae. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bae Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekat serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan renja Kecamatan Bae ini dapat menjadi acuan Rencana Pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Bae serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus.

Kudus, *juli* 2022

CAMAT BAE



MINTO DORO AP

Pembina Tk. I

NIP. 197407171993111002

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Kudus Kode Pos 59352
Telp (0291) 430010 Faks (0291) 430010
Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2/10 / 34.01/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

CAMAT BAE,

- Mengingat : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bae Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

REPUBLICAN PARTY
STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
ELECTORAL COLLEGE



STATE OF TEXAS

COUNTY OF []

NOTICE

TO THE ELECTORS OF THE REPUBLICAN PARTY OF TEXAS

WHEREAS

The Republican Party of Texas is organized under the laws of the State of Texas, and is a political party entitled to the right of electing its members to the office of elector in the electoral college of the State of Texas.

ARTICLE I

Section 1. The members of the Republican Party of Texas shall be those persons who have been admitted to membership in accordance with the rules and regulations of the party.

ARTICLE II

Section 1. The members of the Republican Party of Texas shall be those persons who have been admitted to membership in accordance with the rules and regulations of the party.

Section 2. The members of the Republican Party of Texas shall be those persons who have been admitted to membership in accordance with the rules and regulations of the party.

Section 3. The members of the Republican Party of Texas shall be those persons who have been admitted to membership in accordance with the rules and regulations of the party.

Section 4. The members of the Republican Party of Texas shall be those persons who have been admitted to membership in accordance with the rules and regulations of the party.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President of the Senate, dated January 10, 1877. The letter is addressed to the President of the Senate and is signed by the Secretary of the State.

2. The second part of the document is a letter from the President of the Senate to the Secretary of the State, dated January 11, 1877. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the President of the Senate.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President of the Senate, dated January 12, 1877. The letter is addressed to the President of the Senate and is signed by the Secretary of the State.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the Senate to the Secretary of the State, dated January 13, 1877. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the President of the Senate.

5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President of the Senate, dated January 14, 1877. The letter is addressed to the President of the Senate and is signed by the Secretary of the State.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
 - b. Melakukan Pengendalian Penyusunan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
 - c. Merumuskan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
 - d. Menyajikan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
 - e. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Bae.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Juli 2022



Lampiran SK Camat Bae

Nomor : 050.2/ 10 /34.01/ 2022

Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja
Kecamatan Bae

Tanggal : 1 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BAE**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mintoro, AP	Camat	Ketua
2.	Sunardi, SE	Sekretaris	Sekretaris
3.	Drs. Ganda Uli Saragih	Kasi Tapem	Ketua Kelompok Kerja
4.	Yusida Tri Yulianti, S.IP	Kasubbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
5.	Faradhiba Supu, S.PD.SD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Kelompok Kerja
6.	Sakuri, SH	Kasi Ekbang dan Kesra	Anggota Kelompok Kerja
7.	Junaity Rahajuningsih, SH	Kasi Yanum	Anggota Kelompok Kerja
8.	Irawati, SE	Staf Subbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
9.	Siti Romlah	Staf Subbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja

Ditetapkan di Kudus
Pada Juli 2022



DATE: _____

THEORY OF THE ATOM

1. The atom is made up of three sub-particles, namely, electrons, protons and neutrons.

2. Electrons are negatively charged particles.

3. Protons are positively charged particles.

4. Neutrons are neutral particles.

5. The mass of an electron is very small compared to that of a proton.

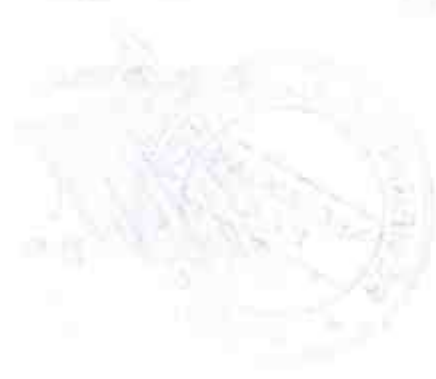
6. The mass of a neutron is slightly more than that of a proton.

7. The atom is electrically neutral.

8. The atom is made up of a central nucleus.

9. The nucleus is made up of protons and neutrons.

Page No. _____





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Kudus Kode Pos 59352
Telp (0291) 430010 Faks (0291) 430010
Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 910/ // / 34.01/ 2022

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

CAMAT BAE,

- Mengingat : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bae Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



UNIVERSITY OF CALICUT

UNIVERSITY OF CALICUT

UNIVERSITY OF CALICUT

UNIVERSITY OF CALICUT

UNIVERSITY OF CALICUT

UNIVERSITY OF CALICUT

The following are the names of the students who have been admitted to the B.A. (Hons.) Mathematics programme for the year 2023-24. The names are listed in the order of their roll numbers.

1. A. ABHIRAM
2. A. ADARSH
3. A. ADITHYAN

4. A. ADITHYAN
5. A. ADITHYAN
6. A. ADITHYAN

7. A. ADITHYAN
8. A. ADITHYAN
9. A. ADITHYAN

10. A. ADITHYAN
11. A. ADITHYAN
12. A. ADITHYAN

13. A. ADITHYAN
14. A. ADITHYAN
15. A. ADITHYAN

5. Undang - undnag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalia, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a clear and concise manner, and that the records must be maintained for a minimum of five years. It also notes that the records must be accessible and available for review at any time.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to comply with the record-keeping requirements. It states that individuals or organizations that fail to maintain accurate records may be subject to penalties, including fines and imprisonment.

4. The fourth part of the document provides information on how to obtain further assistance. It notes that individuals who have questions or need help with record-keeping should contact the appropriate authorities, such as the Internal Revenue Service or the Department of Justice.

5. The fifth part of the document concludes by reiterating the importance of record-keeping and the consequences of non-compliance. It encourages individuals and organizations to take the necessary steps to ensure that their records are accurate and up-to-date.

6. The sixth part of the document provides a list of resources for further information. It includes links to the Internal Revenue Service website, the Department of Justice website, and other relevant organizations. It also provides contact information for the appropriate authorities.

7. The seventh part of the document discusses the role of record-keeping in the overall financial system. It notes that accurate records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. It also notes that record-keeping is a key component of the internal control system of any organization.

8. The eighth part of the document provides a summary of the key points discussed in the document. It reiterates the importance of record-keeping and the consequences of non-compliance. It also provides a list of resources for further information.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Renvana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kudus;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA**, : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Juli 2022



1. The first part of the paper is devoted to a general introduction of the subject. It is shown that the problem of the existence of a solution of the differential equation $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$ is equivalent to the problem of the existence of a solution of the integral equation $y(x) = \int_a^b K(x, \xi)y(\xi) d\xi + \int_a^b L(x, \xi)r(\xi) d\xi$.

2. In the second part of the paper, the existence of a solution of the integral equation is proved. It is shown that if the kernel $K(x, \xi)$ is continuous and the function $r(x)$ is continuous, then there exists a unique solution of the integral equation.

3. In the third part of the paper, the existence of a solution of the differential equation is proved. It is shown that if the functions $p(x)$, $q(x)$, and $r(x)$ are continuous, then there exists a unique solution of the differential equation.

4. In the fourth part of the paper, the existence of a solution of the differential equation is proved. It is shown that if the functions $p(x)$, $q(x)$, and $r(x)$ are continuous, then there exists a unique solution of the differential equation.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES
 DEPARTMENT OF MATHEMATICS
 5734 S. UNIVERSITY AVENUE
 CHICAGO, ILLINOIS 60637



BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PD BIDANG PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUDUS

Pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan forum PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Klarifikasi, tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum PD terhadap materi yang dibahas sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
J a m : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 Setda

Forum PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2022

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan pokok pikiran DPRD;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Renja PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas PD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus ini; dan
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 9 Maret 2022

Pimpinan Sidang


TEGUH RIYANTO, S.STP, M.M
NIP. 19780828 199703 1002

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

FROM: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

RE: [Subject]

DATE: [Date]

[Text block 1]

[Text block 2]

[Text block 3]





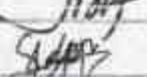



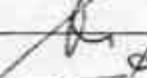







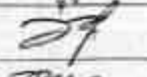
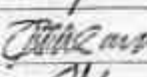
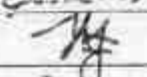

[Text block 4]



[Text block 5]

[Text block 6]

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2022

No	Nama	Unsur Perwakilan/ Perangkat Daerah	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sri Sunardi	Bappeda	Jf. Koordinator PEP	
2.	Dwi Retno W	Sekretariat Daerah	Sub. Koord. Peny. Prog	
3.	Irena K Uta	Sekretariat DPRD	Kasubbang PEP	
4.	ARIE HERMAN	Dinas Dukcapil	Kasubbang PK	
5.	M Saddam H	Dinas Kominfo	Penyusun prog anggaran	
6.	Ari JP	Dinas Arpus	Prakom	
7.	Nurul A.S	BKPP	BEND. Pengeluaran	
8.	Sri Sunardi	Dinas PMD	UMD	
9.	Sri Retno P	Inspektorat Daerah	PEP	
10.	Zulka Murnawati	Satpol PP	Kasubbang PEP & kaw	
11.	PR. PRATIWI	Kantor Kesbangpol	Kasubbang TU	
12.	Tina Dwi L	Kecamatan Kaliwungu	Gap	
13.	Sri Sunardi	Kecamatan Kota	PEP	
14.	Risno	Kecamatan Jati	PEP	
15.	dk. Saulya Hidayat	Kecamatan Undaan	PEP	
16.	Arti Noor Anggoro	Kecamatan Mejobo	ka selis pelayanan	
17.	Kerman Suhayono	Kecamatan Jekulo	Kasubbang PEP & Kaw	
18.	Jusida	Kecamatan Bae		
19.	HURLA MU	Kecamatan Gebog	Kasubbang PEP & kaw	
20.	KAROL	Kecamatan Dawe	- . .	

Handwritten title or header at the top of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.

Bottom section of handwritten text, possibly a conclusion or additional notes.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
 Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
1	Rina K. Utami	Sd. DPRD		1.
2	Wahyu P. L			2.
3	P. JOKO LEWKO	Kel. Mlbi Kikul	L	3.
4	Kusman Satiyono	Kec. Jekulo		4.
5	Maryanti	Ket. Mqjobu		5.
6	Arip Anggoro			6.
7	Mega Janti	ke jaman		7.
8	Sri Prucma	Pangpadm.		8.
9	NOVITA SETYANTI	Bagpda		9.
10	Achmad Pardi	Bag. Protomyim		10.
11	Piliha	kominfo.		11.
12	Sridani			12.
13	Solihun	Bag. Kesra		13.
14	Sri Maryanti	Bag. Hukum		14.
15	Zakha M	Satpol PP		15.
16	Piyanti	Kel. Wirog Kulon		16.
17	Petru	Bag Adbang		17.
18	PR. PRATIWI	KESBANGPOL		18.
19	Histiani A			19.
20	Sulistiwati	Bag. Perekonomian		20.
21	Ahmed Hata	Kerjasama		21.
22	Fania R	Bag. Organisasi		22.
23	MURLO M.U	Kec Gebog		23.
24	Erni S.	Bag. Urusan		24.
25	Reza W	Pol PP		25.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
 Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
26	Nurul A.S	BKPP		26.
27	Muchlis	Kajatan		27.
28	Kelana Botolita	Uletanorowita		28.
29	Nuryanto	Malahorowita		29.
30	Kamisa	Wang Wang		30.
31	Eva Istiana	Bag. PPS		31.
32	Sutigna	PUMP		32.
33	Harold	DINO		33.
34	Annas Wahyuni	Sunggilingan		34.
35	Tina Dwi L	Kec. Kalirungu		35.
36	Neman			36.
37	Rochan			37.
38	Kurni Akhri	Panjunan		38.
39	Teguh R	Bagor		39.
40	Rofik	Inspektat		40.
41	Si Purwanti			41.
42	Imam Supardi	Kec. Gebog		42.
43	Del Rokhim	Bag Pemerintahan		43.
44	Sulwanah	Kec. Kete		44.
45	Bagus	MUP		45.
46	Ari Zoko P	Arpus		46.
47	Pio Dwi Widada	Kujatan		47.
48	Dara Alexandra. P	Uluwu		48.
49	Herul Setiawan	Bag. Umum		49.
50	Dhori	Bag Umum		50.

MEMORANDUM

TO : SAC, NEW YORK
 FROM : SAC, PHOENIX
 SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
 Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
51	Esi Eudya	persiapan sat- Baz		51.
52	yusidel	Baz		52.
53	Helenora	Bog. um		53.
54	Christy	Kec. Jekulo		54.
55	Diana NR	Dukcapil		55.
56	Amof H	Dukcapil		56.
57	Sk. Sadyaningtyah	Kec. Lendah		57.
58	Risnaw	Kec. Jani		58.
59	Aulina. LP	PER Bappeda	P	59.
60	Vebi Belosita	Litbang Bappeda	L	60.
61	Rimpidi Hendrawan	Litbang Bappeda	L	61.
62	Pratiwi R	Inspektoriat		62.
63	Amient A	Ind. PER Bappeda	L	63.
64	Uswatah	Perencanaan	P	64.
65				65.
66				66.
67				67.
68				68.
69				69.
70				70.
71				71.
72				72.
73				73.
74				74.
75				75.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
76				76.
77				77.
78				78.
79				79.
80				80.
81				81.
82				82.
83				83.
84				84.
85				85.
86				86.
87				87.
88				88.
89				89.
90				90.
91				91.
92				92.
93				93.
94				94.
95				95.
96				96.
97				97.
98				98.
99				99.
100				100.

NOTULEN RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BIDANG PEMERINTAHAN

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Maret 2022
Jam : 08.00 - Selesai
Tempat : R. Rapai Selda LT.4
Pimpinan rapat : Kabag Organisasi
Jumlah peserta : 65 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan oleh Kabag Organisasi
2. Penyampaian Usulan oleh Perangkat Daerah
3. Penutup

Hasil Pembahasan : 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Belum ada Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) padahal termasuk IKU Bupati, Tahun 2023 belum ada dukungan ke arah TNDE.
- Saran: dikoordinasikan dengan bidang Arsip, perlu anggaran atau tidak, dikoordinasikan dengan Kominfo terkait aplikasi Srikandi yang di dalamnya ada TNDE

2. BKPP

- Tahun 2023 belum ada anggaran untuk peningkatan/ pengembangan potensi untuk Jabfung.
- Tahun 2023 ada pembinaan diklat fungsional, diklat analisis kebijakan
- Saran: diharapkan ke depan Jabfung lebih baik (jangan ditinggalkan dan tetap dikontrol)

3. Dinas PMD

- Fasilitasi Profil desa anggaran besar, seharusnya profil desa diupdate tiap tahun biar baik.

4. Kominfo

- Ada kegiatan pengelolaan konten, konten apa? anggaran besar 5 milyar.
- jawaban: konten berisi berita di kab. kudas, baik media cetak dan elektronik untuk mendukung image kinerja, komunikasi publik.
- saran: aplikasi harus diintegrasikan, contoh: banyumas dimana semua aplikasi dibuat oleh Kominfo.

5. Dukcapil

- Penambahan anggaran untuk penyelenggaraan SMKI sebesar 100 juta
- Butuh pendampingan manajemen ISO (Perub 2022)

6. inspektorat

- Jasa pemeliharaan kendaraan dinas, ada 45 kendaraan terdiri dari mobil B, motor 42 sementara jumlah ASN 46 orang.
- belum ada standar baku terkait BMD, seharusnya kontrol di asset
- ke depan, pengadaan kendaraan dinas perangkat daerah bisa dilihat lagi disesuaikan dengan beban pekerjaan. jumlah

Main body of the document containing multiple lines of faint, illegible text. The text appears to be organized into paragraphs or sections, though the specific content cannot be discerned due to the low contrast and blurriness of the scan.

- penambahan anggaran untuk kursi kerja ASN sebanyak 10 buah sebesar Rp. 3.500.000,-

8. Kecamatan Gebog

- penambahan anggaran untuk BBM untuk patrol ke 11 desa

9. Kecamatan Mejubo

- anggaran yang diusulkan harap dipenuhi dan tidak dikurangi

10. Kecamatan Jekulo

- Tiap tahun ada penambahan 200 juta untuk operasional dan sarpras

11. Kelurahan Sunggingan

- Sarpras terpusat di aset, inventaris kendaraan dinas untuk kelurahan (motor dinas tidak layak)

- SDM di kelurahan terbatas

12. Kelurahan Purwosari

- Profil desa anggarannya besar, tetapi tidak ada pembinaan di kelurahan sehingga pengisian lama

- anggaran di semua kelurahan disamakan semua, padahal kondisi kelurahan berbeda-beda seharusnya ada standar yang disesuaikan dengan luas wilayah atau jumlah penduduk.

- usulan anggaran tahun 2023 harap dipenuhi tidak dikurangi

13. Kelurahan Kajeksan

- Profil kelurahan kok tidak ada di ranwal, padahal profil desa sudah ada dana mandiri

- anggaran disamakan dengan kondisi, sesuai luas wilayah atau jumlah penduduk

14. Kelurahan Wergu Wetan

- Bappeda/ TAPD untuk mengakomodir usulan di kelurahan untuk survey ke lapangan terkait sarpras (kondisi real) di kelurahan sehingga dapat merencanakan untuk ke depan.

15. Kelurahan Panjunan

- Usulan Pembangunan Gedung (Kantor belakang ambrol/rusak) belum diperbaiki padahal usulan sudah dari tahun 2015, tapi 2 tahun ini tidak diusulkan. mohon 2023 usulan tersebut diakomodir.

16. Kelurahan Kerjasan

- Terkait dengan POKIR untuk kelurahan, mohon untuk difuruskani Kembali karena banyak permasalahan

17. Kesbangpol

- Tahun 2023, kesbang berganti dari kantor menjadi Badan, anggaran diharapkan mendukung untuk Badan

- Usulan sarpras (laptop dan printer)

- Usulan Pemeliharaan Sarpras

- Permasalahan distribusi surat menyurat (diharapkan koordinasi dengan kominfo terkait aplikasi Srikandi)

- tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilu

18. Satpol PP

- usulan penambahan anggaran untuk BBM patrol

- Perubahan 2022 (pengadaan mobil damkar)

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

- penambahan anggaran untuk laptop dan scanner dalam rangka mendukung LPPD
20. Bagian Kepra
- Tambahan anggaran untuk operasional penyelenggaraan Haji dan MTQ yang tidak tercantum di ranwal
21. Bagian Hukum
- Usulan sarpras dalam rangka mendukung DJDIH.
22. Bagian Administrasi Pembangunan
- penambahan usulan honor pengelola keuangan
 - Penambahan perjalanan dinas (kondisi sekarang hanya 1.100.000 untuk setahun)
 - Penambahan biaya pemeliharaan asset seperti printer (diusulkan perub 2022)
23. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Server (selama ini dari Kominfo) diharapkan dapat beli sendiri dan terpisah dari Kominfo
 - penambahan sarpras (bidding room) agar penilaian tinggi
24. Bagian Umum
- Penambahan AC
 - Pembangunan Parkir
 - Pemeliharaan Rumah dinas
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - Pengadaan Barang
 - Asuransi Gedung dan Asuransi Kendaraan Dinas
25. Bagian Protokol Pimpinan
- anggaran sudah cukup, harap dipenuhi
26. Bagian Organisasi
- penambahan anggaran untuk penyusunan dokumen anjab/ABK Jabfung dan peningkatan pelayanan public (monitoring dan evaluasi) dirasa kurang maksimal
 - Pembangunan Lobi untuk Gedung setda untuk menerima tamu, karena tidak punya kontrol penerimaan tamu.

NOTULIS



(Pratiwi Rahmawati, S.Pi, MT)

Lampiran

: Camat Bae

Nomor

Tanggal

Juli 2022

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023**

NO	URAIAN	KESESUAIAN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V		
2.	Pengolahan Data dan Informasi	V		
3.	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	V		
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	V		
5.	Penentuan Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V		
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten	V		
7.	Perumusan Tujuan dan Sasaran	V		
8.	Penelaahan Usulan Masyarakat	V		
9.	Perumusan Kegiatan Prioritas	V		
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten	V		
10a.	Meyelaraskan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Usulan Program dan Kekuatan Hasil Musrenbang Kecamatan	V		
10b.	Mempertajam Indikator dan target Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V		
10c.	Mensinkronkan Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas pelaksanaan	V		
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu Indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Bupati	V		
11.	Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten disusun berdasarkan pendekatan Kinerja, Perencanaan dan Penganggaran terpadu.	V		
12.	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten	V		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V		
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	V		

Kudus, Juli 2022



1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944



Form E.70
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Hasil Pengendalian dan Evaluasi		
		Kesesuaian Ada (3)	Tidak Ada (4)	Faktor Penyebab Ketidaksesuaian (5)
(1)	(2)			Tidak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak (6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓		
2.	Pengolahan data dan informasi	✓		
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	✓		
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	✓		
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓		
6.	Peneleahan rancangan awal RKPD Kabupaten	✓		
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓		
8.	Peneleahan usulan masyarakat.	✓		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓		
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten	✓		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓		
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓		
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati	✓		
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓		
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah	✓		

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes the need for consistency and thoroughness in bookkeeping.

2. The second part of the text focuses on the classification of assets and liabilities. It explains how to distinguish between current and long-term assets, and between current and long-term liabilities.

3. The third part of the text discusses the calculation of net worth. It shows how to subtract total liabilities from total assets to determine the owner's equity in the business.

4. The fourth part of the text covers the preparation of financial statements. It outlines the steps for creating a balance sheet, an income statement, and a statement of cash flows.

5. The fifth part of the text discusses the importance of budgeting and financial planning. It explains how to set financial goals and develop a plan to achieve them.

6. The sixth part of the text discusses the importance of understanding the time value of money. It explains how to calculate the present value of future cash flows and the future value of current investments.

7. The seventh part of the text discusses the importance of understanding risk and return. It explains how to evaluate the trade-off between risk and return in investment decisions.

8. The eighth part of the text discusses the importance of understanding the impact of taxes on financial decisions. It explains how to calculate the tax implications of different investment and financing choices.

9. The ninth part of the text discusses the importance of understanding the impact of inflation on financial decisions. It explains how to adjust for inflation when evaluating the value of money over time.

10. The tenth part of the text discusses the importance of understanding the impact of interest rates on financial decisions. It explains how to evaluate the impact of changes in interest rates on the value of investments and loans.

Account	Debit	Credit
1. Cash		100.00
2. Accounts Receivable	50.00	
3. Inventory	20.00	
4. Equipment	30.00	
5. Accounts Payable		40.00
6. Long-Term Debt		20.00
7. Owner's Equity		100.00
Total	100.00	100.00

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
No	Uraian	Ada (3)	Tidak Ada (4)		
(1)	(2) lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disyahkan	V			

Kudus, 2022

CAMAT BAE



PII. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA.

Drs. REVLIAN TO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 196603211986031006

TELAH DIVERIFIKASI	
No	Jabatan Paraf
1.	Sekretaris
2.	Kepala Bidang
3.	Kasubbid/Subkoordinator
4.	Mitra PD



Handwritten mark or signature.



RESEARCH

CONCEPTS

CONCEPTS

CONCEPTS

A list of items or concepts, possibly related to the research and concepts mentioned above. The text is somewhat blurry but appears to be a structured list or index.

	e) Melaksanakan Pembahasan Rencana Tahunan	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>
	f) Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Tahunan dari masing –masing bidang dan bagian	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>
	g) Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>
	h) Membuat konsep Rencana Kerja (Renja) Tahunan	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>
	i) Mengoreksi konsep dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>
	j) Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Tahunan kepada Bappeda untuk memerintahkan persetujuan	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>
	k) Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Tahunan oleh Direktur kemudian diteruskan ke Bappeda untuk di verifikasi	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

<p>l) Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju</p>	
<p>m) Mengantar surat, menggendakan dan mengarsipkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan</p>	

Kudus, 2022

CAMAT BAE

MARTONO, S.P.

Beribina Tk. I

* NIP.4970717 199311 1 002



